

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) IV DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nadya Vinandari
Dosen Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan
e-mail :nadya.vinandary@yahoo.co.id

Kampus Bina Widya.jl.H.R Soebrantas KM.12,5 SimpBaru Pekanbaru 28293-Telp/fax 0761-63277

Abstract: Implementation Leadership Education And Training (Diklatpim) IV IN Regional Personnel Agency (BKD) Government Rokan Hulu. The purpose of this study is to determine why the implementation of Education and Leadership Training IV for local government officials in Rokan Hulu can not be implemented properly. This study uses data collection through interviews, documentation and observation. Data were analyzed using descriptive qualitative method. Primary data, ie data obtained from interviews with informants research on the implementation of the Education and Training Pim IV, while the secondary data, ie the data in the form so that has been owned by the Office of the Regional Employment Board Rokan Hulu include: a brief history, organizational structure and activities of the Office of BKD Rokan Hulu. This study uses research informants as many as 12 people, where researchers have understood the initial information about the object of research and research informants.

The results based on interviews and field observations in mind that why the implementation of the Education and Training Leadership IV for local government officials in Rokan Hulu can not be implemented properly because not all of the stages in the curriculum structure Pim IV Training can be done well in which four stages namely Stages Laboratory leadership can not be done later Less specifically BKD Rokan Hulu in recruiting participants Pim IV Training from echelon IV officials but has yet to follow Pim IV Training and maximum no practice session was held on Training Pim IV, this is due to the limited facilities and infrastructure owned by BKD Rokan Hulu to conduct practice sessions for the application of the theories being studied by the participants during the training.

Keywords: Education and Training, Education and Leadership Training IV

PENDAHULUAN

Manusia sebagai sumber daya manusia (SDM) sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia menunjang suatu organisasi melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap perusahaan ataupun dalam organisasi, antara lain yaitu: sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai

manajer atau pemimpin, sebagai komisaris dan sebagai pemilik.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang telah berstatus otonomi daerah yang memiliki wewenang/kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka menunjang otonomi daerah tersebut, sumber daya manusia yang bermutu dan handal sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan

suatu upaya pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana. Adisasmita (2011:45) mengatakan Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap sumber daya manusia meningkat sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yaitu dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Aparatur negara sebagai abdi masyarakat, sebaiknya memiliki pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang memadai sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik (Setyawan, 2004:66). Agar aparatur negara mampu memainkan peranannya sebagai pelayan masyarakat maka dibutuhkan aparatur yang mempunyai kinerja yang baik yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. (Dwijodwijoto, 2004:56).

Ketentuan tentang penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, terutama meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, keterampilan, menciptakan pola pikir dan pengembangan metode kerja yang lebih baik serta dalam rangka pembinaan karir pegawai. Sedangkan sasaran penyelenggaraannya adalah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

menurut PP Nomor 101 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas jabatan eselon secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS setuju kebutuhan instansinya.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan berorientasi pemberdayaan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pelatihan adalah suatu proses mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan pegawai untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan diharapkan pegawai mampu bekerja lebih efisien dan pegawai mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik, sehingga dapat terwujud terciptanya tenaga aparatur perencanaan pembangunan yang handal, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu Diklat yang tujuan utamanya agar setiap pegawai mampu bekerja lebih efisien dan pegawai mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik adalah Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklat Pim) II, III dan IV.

Syarat untuk peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan II untuk PNS yang telah menduduki Eselon IIIa (Sarjana), Pendidikan dan Pelatihan III untuk PNS yang telah menduduki Eselon IVa dan perangkat paling rendah IIIc (Sarjana) dan Pendidikan dan Pelatihan IV untuk PNS dengan pangkat paling rendah IIIb (Sarjana).

Pendidikan dan latihan kepemimpinan atau sering disingkat

dengan Diklat Pim merupakan salah satu jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diperlukan dalam pembentukan kinerja PNS untuk jabatan struktural Eselon II, III dan IV. Dengan diadakannya Diklat Pim ini diharapkan aparatur pemerintahan memiliki peningkatan kemampuan serta keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Aspek- aspek yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 13/2013 sebagai berikut:

- 1) Struktur kurikulum
- 2) Persyaratan peserta , pencalonan dan seleksi
- 3) Tenaga kediklatan dan Kompetensi Widyaiswara
- 4) Metode diklat dan sarana prasarana
- 5) Waktu pelaksanaan
- 6) Pembiayaan
- 7) Evaluasi

Aparatur negara harus mampu memainkan peranannya sebagai pelayan masyarakat, maka oleh karena itu dibutuhkan aparatur yang mempunyai kinerja yang baik yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat serta dengan diberikannya pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. (Wahab, 2004:78)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola administrasi kepegawaian dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sebagai satuan kerja yang mengelola administrasi kepegawaian dalam lingkup pemerintah kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau mempunyai misi yaitu menjadikan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Satuan Kerja terbaik dalam pengelolaan administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian menuju Visi Kabupaten Rokan Hulu terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016.

Berdasarkan data kepegawaian yang diperoleh diketahui bahwa pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar yaitu 16 orang atau 55,17 persen memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, Sarjana Muda (D3) sebanyak 1 orang atau sekitar 3,45 persen, SLTA atau sederajat sebanyak 10 orang atau 34,48 persen. Pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang atau 6,90 persen.

Dalam rangka untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten dan berkualitas demi tercapainya tujuan organisasi maka pada tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengikutsertakan sebanyak 7 (tujuh) orang pegawainya untuk mengikuti Diklat Pim IV

Fenomena awal yang ditemui dari hasil pelaksanaan Diklat Pim IV yang telah diikuti pegawai ini adalah adanya pegawai yang belum mengetahui secara jelas kedudukan, tugas dan fungsi organisasi instansi tempatnya bekerja sehingga pegawai tersebut sering mengalami kesulitan dalam menjalankan visi dan misi organisasi, selain itu didalam pelaksanaan kerja yang telah diatur dalam organisasi seringkali tidak sesuai dengan apa telah direncanakan dan adanya ketidakmampuan pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV dalam melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan baik dan benar sehingga prosedur dan mekanisme kerja pada BKD Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui juga untuk melihat pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan IV bagi aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hulu yang belum terlaksana dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu secara deskriptif, menggunakan rancangan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui fenomena yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini dikumpulkan dari informan penelitian dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini penulis lakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena Badan Kepegawai Derah (BKD) Kabupaten Rokan Hulu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dan memiliki tugas sebagai penyelenggara Diklat Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selain itu hasil implemementasi Diklat Pim IV di BKD Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan yang diharapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Dengan demikian, maka sasaran penyelenggaran Diklat Kepemimpinan IV adalah dihasilkannya Pegawai Negeri Sipil yang memilki kemampuan memimpin pada jenjang jabatan struktural eselon IV. Kemampuan memimpin tersebut diwujudkan dengan kemampuannya dalam memimpin perubahan di unit kerjanya. Perubahan ini hanya dapat terwujud jika pejabat struktural tersebut mampu menetapkan area dan fokus perubahan, lalu kemudian mempengaruhi dan memobilisasi stakeholdernya mendukung perubahan tersebut.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran di atas, maka detail kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklat Pim IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang dindikasikan dengan kemampuan:

- 1) Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundangan dan kemampuan untuk menjunjung tingi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya.
- 2) Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi.
- 3) Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi kearah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi.
- 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
- 5) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya.

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Kepemimpinan IV (Diklat Pim IV) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dimana penelitian ini mengambil fokus kepada aspek yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan IV dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 13/2013 sebagai berikut:

- 1) Struktur kurikulum
- 2) Persyaratan peserta , pencalonan dan seleksi
- 3) Tenaga kediklatan dan Kompetensi Widyaiswara
- 4) Metode diklat dan sarana prasarana
- 5) Waktu pelaksanaan
- 6) Pembiayaan

7) Evaluasi

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan IV bagi aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat terlaksana dengan baik, maka penulis akan menguraikan dan menjelaskan hal-hal tersebut didukung oleh data dan informasi yang berhasil diperoleh baik dari fenomena dilapangan, hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian sebagaimana teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1. Struktur kurikulum

Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kedalam muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap tahun pendidikan yang dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV merupakan program yang akan mentransformasi peserta Diklat menuju tujuan yang telah ditetapkan dalam program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ini. Setiap peserta Diklat akan melalui serangkaian proses yang telah disusun untuk membawa peserta kepada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap peserta perlu memahami tujuan dan rangkaian proses tersebut agar dapat mengikuti program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV secara lebih terarah. Tujuan dan rangkaian proses mengandung unsur akademik dan administratif. Aspek akademik meliputi kompetensi yang akan dibangun, struktur kurikulum, dan strategi pembelajarannya. Sedangkan aspek

administratif meliputi dasar hukum dan tata tertib.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa struktur kurikulum yang dipergunakan dalam pelaksanaan Diklat Pim IV di Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas lima tahap pembelajaran yaitu: 1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap Taking Ownership; 3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan; dan 5) Tahap Evaluasi. Kelima tahap pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan. Tahap ini merupakan tahap penentuan area dari pengelolaan kegiatan organisasi yang akan mengalami perubahan. Pada Tahap ini, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi sehingga mampu mengidentifikasi area dari kegiatan organisasi yang perlu direformasi.
- 2) Tahap *Taking Ownership (Breakthrough 1)*. Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area dari kegiatan organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada stakeholdernya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data selengkap mungkin untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya.
- 3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim. Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal dari pengelolaan kegiatan organisasi yang dicita-citakan. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi

stakeholder yang terkait dengan rancangan perubahannya, termasuk dibekali dengan berbagai teknik membangun Tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Proyek Perubahan masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan proyeknya di hadapan stakeholder strategis guna mendapatkan masukan dan dukungan terhadap implementasi proyek perubahan.

- 4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough I). Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi proyek perubahan yang telah dibuatnya.
- 5) Tahap Evaluasi. Tahap pembelajaran ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin implementasi Proyek Perubahan. Kegiatan berbagi pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi Proyek Perubahan. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan operasional dan dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Sedangkan yang tidak berhasil, diberi sertifikat mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

2. Persyaratan Peserta, Pencalonan dan Seleksi

Pentingnya Diklat Pim IV diikuti oleh setiap PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk dapat menciptakan pemimpin perubahan yang mampu melakukan perubahan terutama pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing tempat mereka bekerja. Dalam proses pelaksanaan Diklat Pim IV maka salah satu hal yang paling penting adalah adanya peserta yang

mengikuti pelatihan tersebut, dimana persyaratan utama yang dapat mengikuti adalah PNS yang telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon IV.

Begitu pentingnya manfaat Diklat Pim IV terhadap PNS yang telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon IV sehingga hal ini menjadi sebuah kewajiban untuk diikuti dan dilaksanakan. Selanjutnya adapun persyaratan peserta, pencalonan dan seleksi peserta yang berhak mengikuti pelaksanaan Diklat Pim IV ini dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan Pribadi

1. Sikap, Perilaku dan Potensi yang meliputi :
 - a) Moral yang baik;
 - b) Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c) Kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya;
 - d) Jasmani dan rohani yang sehat;
 - e) Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi; serta
 - f) Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.
2. Usia maksimal 52 tahun untuk eselon IV dan 50 tahun untuk Pembantu Pimpinan
3. Pangkat minimal Penata (III/a).
4. Pendidikan serendah-rendahnya SMU /SMK bagi pejabat eselon IV dan Sarjana muda (D3) untuk Pembantu Pimpinan, atau yang memiliki kompetensi setara dengan yang penyetaraannya ditetapkan oleh Baperjakat instansi yang bersangkutan.
5. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif dan memiliki skor TOEFL minimal 300 atau yang setara.
6. Lulus test yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemendiknas.

B. Kelengkapan dan persyaratan yang harus dibawa

Untuk dapat mengikuti Diklat Pim IV peserta dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun

persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat tugas dari pimpinan unit kerja pengirim
2. Fotocopy surat keputusan terakhir, dan atau telah menduduki jabatan eselon IV
3. Surat keterangan dokter (lampiran surat keterangan kesehatan).
4. Pas photo terbaru (berwarna dengan dasar merah) pakaian sipil lengkap (PSL), wanita pakaian nasional, ukuran 4 x 6 = 2 lembar, dan ukuran 3 x 4 = 2 lembar, Foto Copy DP3
5. Membawa pakaian secukupnya dengan ketentuan:
 - Baju lengan panjang dan dasi bagi pria (wanita tanpa dasi) untuk selama kegiatan perkuliahan.
 - PSL bagi pria (wanita menyesuaikan) untuk acara pembukaan dan penutupan
 - Seperangkat pakaian olahraga untuk kegiatan senam pagi.

Dari persyaratan diatas dapat terlihat bahwa persyaratan dalam pelaksanaan Diklat Pim IV di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah diterapkan dengan sebaik-baiknya dimana persyaratan pribadi dan persyaratan administrasi dibuat serinci mungkin agar setiap peserta dapat lebih berkonsentrasi didalam mengikuti setiap sesi Diklat Pim yang diikuti.

Dalam proses persyaratan peserta, pencalonan dan seleksi yang dilakukan BKD Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan dengan baik dengan telah ditetapkannya persyaratan pribadi dan administrasi yang sangat jelas sehingga memudahkan setiap peserta seleksi untuk bisa mengikuti dan memahaminya. Selain itu dalam proses pencalonan dan seleksi peserta, BKD Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan usaha-usaha yang maksimal dengan menyurati masing-masing Kepala Satuan Kerja untuk mendata bawahannya yang sudah layak untuk mengikuti pencalonan dan seleksi peserta Diklat Pim IV, namun dalam perjalanannya masih ditemui pejabat sturuktural Eselon IV yang

belum mengikuti Diklat Pim IV tersebut sehingga hal ini menjadi sebuah kendala didalam proses mencapai sumber daya aparatur pemerintah daerah yang baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

3. Tenaga kediklatan dan Kompetensi Widyaiswara

Tenaga Kediklatan merupakan Tenaga Pengajar/Widyaiswara sebagaimana yang telah mengikuti diklat bagi pengajar (*Training of Trainer*) atau pendidikan lain yang sejenis serta memiliki kompetensi untuk mampu memberikan materi pembelajaran dan menguasai metodologi pembelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2001 menyebutkan batasan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Yang berhak mengajar pada pelaksanaan Diklat Pim IV yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu adalah orang-orang yang memenuhi ketentuan pedoman diklat yaitu Widyaiswara, Tenaga kediklatan lainnya, Pengelola Lembaga Diklat. Sebagai gambaran terkait tenaga kediklatan ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tenaga Pengajar Kediklatan Pada Diklat Pim IV di BKD Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai gambaran bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi setiap pengajar diklat agar dapat memberikan materi pada pelaksanaan Diklat Pim IV di BKD Kabupaten Rokan Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Persyaratan Tenaga Kediklatan

1. Widyaiswara

Widyaiswara pada Diklat Pim IV memiliki sertifikat kompetensi untuk mengajar pada Diklat Pim IV.

2. Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah

Pengelola dan penyelenggara Diklat Pim IV memiliki kemampuan dalam mengelola Diklat yang dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Diklat *Management of Training* bagi pengelola Diklat.
- b. Sertifikat *Training Officer Course* bagi penyelenggara Diklat.

3. Tenaga Kediklatan Lainnya

Tenaga Kediklatan lainnya Diklat Pim IV memiliki:

- a. Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian yang sesuai program Diklat Pim IV.
- b. Kemampuan dalam penguasaan substansi mata diklat yang diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian untuk mengajar pada program Diklat Pim IV.

B. Kompetensi Widyaiswara

Widyaiswara pada Diklat Pim IV diharuskan mempunyai kompetensi sebagai berikut:

- 1) Menguasai materi yang diajarkan.
- 2) Terampil mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien.
- 3) Mampu menggunakan metode dan media yang relevan

No.	Tenaga Kediklatan	Pengertian
1.	Widyaiswara	Adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
2.	Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah	Adalah PNS yang bertugas pada Lembaga Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program Diklat.
3.	Tenaga kediklatan lainnya	Adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola lembaga Diklat Pemerintah, tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat.

dengan tujuan (indikator) pembelajaran sesuai tuntutan mata diklat

Berdasarkan data lapangan yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penentuan tenaga kediklatan dan kompetensi widyaiswara, BKD Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki standar yang baik didalam merekrut dan menentukan siapa saja yang layak memberikan materi didalam penyelenggaraan Diklat Pim IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, hal ini terlihat dari adanya standar kompetensi yang ditetapkan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga pengajar.

4. Metode diklat dan sarana dan prasarana

Metode adalah seperangkat langkah (apa yang harus dikerjakan) yang tersusun secara sistematis (urutannya logis). Sedangkan Metode Diklat adalah suatu langkah-langkah yang tersusun secara

sistematis dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan.

Setiap pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut Wursanto (1996:61) bahwa pendidikan dan latihan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menambah pengetahuan pegawai
- 2) Menambah keterampilan pegawai
- 3) Mengubah dan membentuk sikap pegawai
- 4) Mengembangkan keahlian pegawai, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif
- 5) Mengembangkan semangat, kemauan dan kesenangan kerja pegawai
- 6) Mempermudah pengawasan terhadap pegawai
- 7) Mempertinggi stabilitas pegawai

Dalam menyusun sebuah metode diklat BKD Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki metode yang tersusun dengan baik dan terencana. Berikut adalah metode diklat yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan Diklat Pim IV di BKD Kabupaten Rokan Hulu:

1. Metode Diklat Pim IV di BKD Kabupaten Rokan Hulu:
 - A. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab.
 - B. Pendalaman materi.
 - 1) Peserta melakukan komunikasi antar peserta secara terorganisasi dan berpikir secara dinamis, agar terbentuk kesamaan pola pikir dan bertindak secara tim (*team learning*);
 - 2) Peserta diberi latihan untuk saling bekerja sama secara aktif dalam berpikir, menyumbangkan ide, mengidentifikasi, membahas dan memecahkan masalah yang menjadi topik bahasan kelompok.
 - C. Studi kasus.
 - 1) Peserta dihadapkan pada suatu peristiwa nyata atau masalah

yang pernah terjadi, mencari faktor penyebab terjadinya kasus, dan cara pemecahan yang setepat-tepatnya;

- 2) Peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan kecapakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kondisi yang nyata dengan menggunakan konsep dan referensi yang dipelajari.

D. Diskusi.

Dalam diskusi ini, peserta membahas tema dan topik-topik permasalahan dalam kelompok, dengan sasaran antara lain untuk mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisa masalah, tukar-menukar informasi serta memperkaya gagasan.

- E. *Visitasi dan Benchmarking ke Best Practice.* *Visitasi* adalah berkunjung ke tempat yang dapat membantu proses internalisasi hasil belajar. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi integritas. *Benchmarking ke Best Practice* Peserta dibekali dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki *best practice* dalam pengelolaan program, melalui pembelajaran *benchmarking*, *knowledge replication*, dan *knowledge customization* melalui metode kunjungan lapangan.

F. Penyajian Proyek Perubahan dan Implementasi Proyek Perubahan

- 1) Peserta secara perorangan diwajibkan menyajikan, membahas, dan saling menanggapi proyek perubahan dalam forum seminar antara peserta;

- 2) Peserta baik perorangan diwajibkan menyajikan, dan mempresentasikan pengalamannya dalam memimpin perubahan, dan menunjukkan kompetensinya melalui kemampuan mengidentifikasi kelemahan dan keunggulannya dalam memimpin perubahan.

Selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana yang dipergunakan sebagai penunjang pengaplikasian metode diklat yang telah disusun dalam Diklat Pim IV di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sarana dan prasarana yang *responsive gender*. Prasarana yang diperlukan dalam Diklat Pim meliputi:

A. Sarana

Penyelenggaraan Diklat Pim IV menggunakan sarana:

- 1) Papan tulis;
- 2) Flip chart;
- 3) *Overhead projector*;
- 4) *Sound system*;
- 5) TV dan video;
- 6) Kaset, *compact disc*;
- 7) Perekam;
- 8) Komputer/Laptop;
- 9) *LCD Projector*;
- 10) Jaringan *Wireless fidelity (Wi-fi)*;
- 11) Buku referensi;
- 12) Modul/Bahan Ajar;
- 13) Bank kasus;
- 14) Teknologi multimedia

B. Prasarana

Penyelenggaraan Diklat Pim IV menggunakan Prasarana:

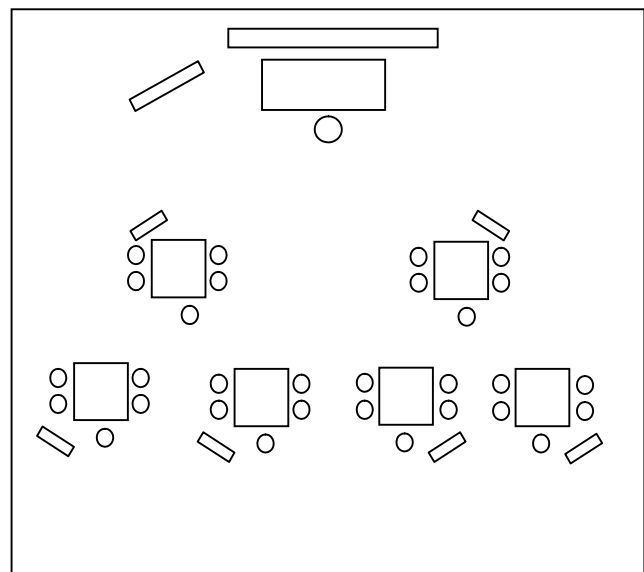
- 1) Aula;
- 2) Ruang kelas;
- 3) Ruang diskusi;
- 4) Ruang seminar;
- 5) Ruang kantor;
- 6) Ruang kebugaran;
- 7) Ruang komputer;
- 8) Ruang laboratorium;

- 9) Asrama bagi peserta;
- 10) Wisma tenaga kediklatan;
- 11) Perpustakaan;
- 12) Ruang makan;
- 13) Fasilitas olahraga;
- 14) Fasilitas rekreasi;
- 15) Unit kesehatan;
- 16) Tempat ibadah

Agar proses aktualisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka *layout* atau tata letak ruangan kelas berbentuk *islands* atau kelompok-kelompok yang terdiri atas 4-5 orang, dengan *flipchart stand* pada masing-masing kelompok. Detail *layout* ruangan kelas yang diterapkan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.

Detail *layout* ruangan kelas Diklat Pim IV yang diterapkan BKD Kabupaten Rokan Hulu



5. Waktu pelaksanaan

Sebagai satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan Diklat Pim IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, BKD Kabupaten Rokan Hulu dalam menetapkan waktu pelaksanaan Diklat Pim IV yaitu sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun sekali dalam satu tahun sesuai dengan mata anggaran pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu.

Waktu pelaksanaan Diklat Pim IV yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada triwulan kedua pada setiap tahunnya yaitu antara bulan Maret, April dan Mei. Dari pernyataan diatas diketahui bahwa perencanaan waktu dalam proses kegiatan Diklat Pim IV di Kabupaten Rokan Hulu telah tertata dan tersusun dengan baik. Selanjutnya untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme waktu pelaksanaan selama Diklat Pim IV, maka akan dilaksanakan dalam 3 sesi waktu.

Sebagai gambaran waktu pelaksanaan dalam penyelenggaraan Diklat Pim IV yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu saat ini dilaksanakan selama 7 minggu yang dibagi kedalam 3 sesi yaitu:

- 1) Sesi Penyampaian Materi. Sesi penyampaian Materi ini dilaksanakan selama 3 minggu dengan mengkaji tema-tema terkait dengan kepemimpinan, kinerja aparatur, motivasi dan lain sebagainya.
- 2) Sesi Praktek. Sesi praktek terhadap materi-materi yang dipelajari akan dilaksanakan selama 3 minggu dimana setiap peserta diklat diberi tugas-tugas terkait dengan materi-materi yang dipelajari selama ini sekaligus mempraktekkannya di dalam maupun diluar ruangan kelas.
- 3) Sesi Orientasi Lapangan. Sesi orientasi lapangan ini dilaksanakan selama 1 minggu dimana seluruh peserta Diklat Pim IV akan berkunjung kedaerah yang memiliki penataan aparatur yang bagus serta penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dari uraian 3 sesi waktu pelaksanaan Diklat Pim IV yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu kendala yang ditemui didalam melaksanakan 3 sesi ini adalah disaat melakukan sesi praktek, dimana sampai saat ini BKD Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki laboratorium

kepemimpinan yang fungsinya untuk menguji materi-materi yang diterima oleh peserta selama sesi materi dilaksanakan.

Untuk waktu pelaksanaan Diklat Pim IV di dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah tersusun dengan baik dimana setiap tahunnya Diklat Pim IV dapat terlaksana. Selain itu dalam sesi pelaksanaannya juga telah ditata dengan sebaik mungkin namun ada kelemahan didalam sesi pelaksanaan Diklat Pim IV tersebut dimana dalam sesi praktek belum bisa maksimal dilaksanakan dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu.

6. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses kegiatan yang dilaksanakan, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga kebutuhan yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal.

Dalam proses pembiayaan untuk pelaksanaan Diklat Pim IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah dianggarkan didalam APBD Kabupaten Rokan Hulu pada setiap tahunnya, sebagai gambaran umum terkait kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat Pim IV yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Anggaran Biaya Pelaksanaan Diklat Pim IV Tahun 2010 s/d 2013

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang didapat dilapangan diketahui bahwa dalam hal pembiayaan Diklat Pim IV yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dimana hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran yang diajukan setiap tahunnya untuk pelaksanaan Diklat Pim IV sehingga terkait pembiayaan tidak bisa dijadikan penghabat terkait kurang baiknya pelaksanaan Diklat Pim IV yang selama ini diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu.

7. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Sebagai gambaran umum bagaimana evaluasi penilaian terhadap peserta yang mengikuti Diklat Pim Tingkat IV di BKD Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat dilihat kepada 2 (dua) aspek dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 3. Aspek-Aspek Penilaian

No	Aspek	Bobot (%)
1.	Sikap dan Perilaku	35
2.	Kualitas	65

1. Aspek Sikap dan Perilaku

Unsur yang dinilai dalam aspek Sikap dan Perilaku serta bobotnya adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran		
			Tahun	Peserta Diklat	Anggaran Dana
1	Mewujudkan aparatur yang profesional dalam pelayanan publik dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung disiplin aparatur	2010	40 Orang	1.900.000.000
			2011	60 Orang	2.600.450.000
			2012	40 Orang	2.200.500.000
			2013	40 Orang	2.632.465.000

Tabel 4. Aspek Penilaian Sikap dan Perilaku

No	Unsur	Bobot (%)
a.	Integritas	10
b.	Etika	10
c.	Kedisiplinan	5
d.	Kerjasama	5
e.	Prakarsa	5
Jumlah		35

Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur aspek Sikap dan Perilaku adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah ketaatan dan kemampuan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan kelompok. Indikator integritas adalah:

- 1) Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas setiap tahap Diklat;
- 2) Ketegasan dalam menyampaikan ide dan gagasan;
- 3) Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas setiap tahap Diklat;
- 4) Kepatuhan pada nilai-nilai agama dan moral setiap tahap Diklat. Pengamatan dan penilaian integritas menggunakan *Formulir 2*.

b. Etika

Etika adalah kemampuan berperilaku, bertutur kata, bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, kelompok dan etika PNS. Indikator etika adalah:

- 1) Kesopanan dalam berperilaku setiap tahap Diklat;
 - 2) Kesantunan dalam bertutur kata;
 - 3) Toleransi terhadap keragaman agama, suku, bahasa dan ras;
 - 4) Empati dalam pergaulan setiap tahap Diklat.
- Pengamatan dan penilaian integritas menggunakan *Formulir 3*.

c. Kedisiplinan

- Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Diklat. Indikator kedisiplinan adalah:
- 1) Ketaatan dalam melaksanakan urutan kegiatan setiap tahap Diklat;
 - 2) Ketepatan hadir dalam mengikuti setiap kegiatan Diklat;
 - 3) Kesungguhan dalam mengikuti setiap tahap Diklat;
 - 4) Kepatuhan terhadap tata tertib setiap tahap Diklat.
- Pengamatan dan penilaian kedisiplinan menggunakan *Formulir 4*.

d. Kerjasama

- Kerjasama adalah kemampuan berkoordinasi dan bersinergi dengan widyaiswara, penyelenggara dan sesama peserta dalam menyelesaikan tugas secara bersama, serta mampu mempertemukan berbagai gagasan. Indikator kerjasama adalah:
- 1) Berkoordinasi dengan widyaiswara, penyelenggara dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas-tugas dalam setiap tahap Diklat;
 - 2) Bersinergi dengan widyaiswara, penyelenggara dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas-tugas dalam setiap tahap Diklat;
 - 3) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok;
 - 4) Mau menerima pendapat orang lain.
- Pengamatan dan penilaian kerjasama menggunakan *Formulir 5*.

e. Prakarsa

Prakarsa adalah kemampuan mengajukan gagasan atau inovasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. Indikator prakarsa adalah:

- 1) Membantu terciptanya iklim Diklat yang kondusif bagi lahirnya ide-ide pembaharuan;
 - 2) Mampu membuat saran pembaharuan;
 - 3) Aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran;
 - 4) Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan.
- Pengamatan dan penilaian prakarsa menggunakan *Formulir 6*.

Penilaian sikap dan perilaku dilakukan oleh penyelenggara, tenaga pengajar, *mentor* dan *coach*.

2. Kualitas Perubahan

Unsur yang dinilai dalam aspek Kualitas Perubahan dan bobotnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Aspek Penilaian Kualitas Perubahan

No	Unsur	Bobot (%)
a.	Identifikasi Perubahan	10
b.	Rancangan Perubahan	10
c.	Pemimpin Perubahan	45
Jumlah		65

a. Identifikasi Perubahan

Indikator unsur identifikasi perubahan meliputi:

- 1) Ketepatan fokus perubahan;
- 2) Kelayakan perubahan;
- 3) Rasionalitas perubahan;
- 4) Dukungan stakeholder;
- 5) Manfaat perubahan.

Penilaian identifikasi perubahan dilakukan penyelenggara, tenaga pengajar, *mentor* dan *coach* dengan

menggunakan *Formulir 7*.

b. Rancangan Perubahan

Indikator unsur rancangan perubahan meliputi:

- 1) Kejelasan visi perubahan
- 2) Kejelasan identifikasi stakeholder
- 3) Kejelasan langkah-langkah mewujudkan perubahan;
- 4) Sistematika penulisan

Penilaian rancangan perubahan dilakukan oleh penyelenggara, tenaga pengajar, *mentor* dan *coach* dengan menggunakan *Formulir 8*

c. Pemimpin Perubahan

Indikator unsur pemimpin perubahan meliputi:

- 1) Kemampuan mempengaruhi stakeholder;
 - 2) Kemampuan membangun tim efektif;
 - 3) Ketangguhan (*endurance*) dalam melaksanakan rencana perubahan;
 - 4) Kualitas implementasi rancangan perubahan;
 - 5) Kepatuhan terhadap etika birokrasi.
- Penilaian pemimpin perubahan dilakukan oleh penyelenggara, tenaga pengajar, *mentor* dan *coach* dengan menggunakan *Formulir 9*

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Diklat Pim Tingkat IV oleh suatu tim yang telah ditetapkan. Susunan Tim adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Lembaga Diklat sebagai Ketua;
- b) Penanggungjawab harian sebagai Wakil Ketua;
- c) Penanggungjawab Evaluasi Program sebagai Sekretaris;
- d) Seorang Pejabat dari Unit Kepegawaian masing-masing peserta Diklat sebagai Anggota;
- e) Koordinator Widyaiswara sebagai Anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek kualitas perubahan. Nilai aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi

direkapitulasi dengan pembobotan masing-masing sehingga menghasilkan Nilai Akhir dengan menggunakan *Formulir 10*. Ketidakhadiran peserta melebihi 6 (enam) sesi atau 18 (delapan belas) jam pelajaran dinyatakan gugur.

4. Kualifikasi Kelulusan

Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan (skor 92,5 – 100);
2. Memuaskan (skor 85,0 – 92,4);
3. Baik Sekali (skor 77,5 – 84,9);
4. Baik (skor 70,00 – 77,4).

Peserta Diklat yang memperoleh nilai kurang dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan tidak lulus.

Berdasarkan gambaran bagaimana proses penilaian dan evaluasi diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Rokan Hulu didalam mengevaluasi pelaksanaan Diklat Pim IV yang diikuti oleh setiap peserta hal ini telah berjalan dengan baik dimana terstrukturnya item-item yang menjadi dasar penilaian dan pengevaluasian setiap peserta Diklat, selain itu dalam proses penyelenggaraanya juga terlihat koordinasi dan komunikasi yang baik dan harmonis antara pejabat stuktural dilingkungan BKD Kabupaten Rokan Hulu, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang baik didalam proses mewujudkan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yang kredibel dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengapa pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan IV bagi aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan tidak semua tahapan stuktur kurikulum dapat terlaksana dengan baik dimana tahapan keempat yaitu Tahapan Laboratorium Kepemimpinan belum bisa terlaksana. Saran yang perlu dilakukan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten

Rokan Hulu dalam mengelola penyelenggaraan Diklat Pim IV bagi aparatur pemerintah daerah agar lebih meningkatkan proses struktur kurikulum, persyaratan peserta, pencalonan dan seleksi tenaga kediklatan dan kompetensi widyaiswara, metode diklat dan sarana prasarana, waktu pelaksanaan, pembiayaan dan evaluasi kegiatan supaya penyelenggaraan Diklat Pim IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kurang tegasnya BKD Kabupaten Rokan Hulu dalam merekrut peserta Diklat Pim IV yang berasal dari pejabat struktural eselon IV namun belum mengikuti Diklat Pim IV, dimana para pejabat eselon IV ini selalu memiliki alasan untuk menolak mengikuti Diklat Pim IV tersebut. Saran yang perlu dilakukan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hulu supaya lebih aktif dan tegas didalam menjaring setiap peserta yang akan mengikuti Diklat Pim IV dengan cara menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk bisa mendata dan merekomendasikan para pegawainya yang sudah dan akan menduduki jabatan struktural eselon IV untuk bisa mengikuti pelaksanaan Diklat Pim IV.

dan kepemimpinan, maka diharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hulu untuk kedepannya bisa membangun laboratorium kepemimpinan ini guna menunjang pelaksanaan Diklat Pim IV

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta:
- Abdullah, Khusaini, 2007, *Kinerja Perusahaan*, Rineka Cipta, Jakarta

- Dwijodwijoto, Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Cetakan 2, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Handoko, T. Hani, 2008, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Kartono, Kartini. 2006. "Pemimpin dan kepemimpinan", Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manullang, 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Edisi Keenam, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, LP3ES, Jakarta.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. PT Gunung Agung, Jakarta
- Nitisemito, Alex S., 2005, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke IV, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satrohadiwiryono, Ady. 2005, *Manajemen Diklat*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang, 2009. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Setyawan, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta:
- Ranupandojo, Heidirachaman, 2005, *Manajemen Personalia*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Wahab, 2004, *Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, FEUI
- Westa, Septoadi, 2005, *Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peranturan dan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil